

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Sorot Keberadaan TGUPP

Gambir, Warta Kota

Komisi E DPRD DKI Jakarta bakal memanggil anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Achmad Haryadi. Pemanggilan Haryadi menyusul posisinya yang merangkap jabatan menjadi Dewan Pengawas di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta.

"Kami akan *follow up*, kami akan coba lihat dulu payung hukumnya. Berarti *kan* dia menerima dua gaji, di TGUPP dan Dewan Pengawas. Ini boleh atau tidak," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria, Senin (9/12).

Lalu, Iman membandingkan dengan pejabat daerah di DKI Jakarta. Kata dia, pejabat di DKI tidak boleh merangkap jabatan definitif karena dikhawatirkan pekerjaannya tidak akan fokus. Implikasinya pelayanan terhadap masyarakat bisa terganggu. "Tapi persoalannya dia *kan* bukan sebagai pejabat karena sudah pensiun dari Bappeda DKI," katanya.

"Selain melihat di samping sisi hukum, kami juga lihat dari efektivitasnya juga. Kalau dia memang ke sana (TGUPP) dan ke sini (Dewan Pengawas) itu terlalu riweuh (ribet)," tam-

Tapi persoalannya dia kan bukan sebagai pejabat karena sudah pensiun dari Bappeda DKI.

Iman Satria
Ketua Komisi E
DPRD DKI Jakarta

bahnya.

Berdasarkan informasi, Haryadi bekerja menjadi dewan pengawas di RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo, RSUD Duren Sawit, dan RSUD Budi Asih.

Kebablasan

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, pun mengaku geram. "Terus terang saja, saya mau OTT yang namanya TGUPP karena ini sudah menjadi pola baru di Pemda DKI," kata Prasetyo saat rapat Badan Anggaran (Banggar) de-

ngan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta pada Senin (9/12).

Hal itu juga disebabkan dengan kewenangan TGUPP yang dinilai kebablasan. Pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2019 tentang TGUPP, fungsi mereka terlalu terlibat ke dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Padahal seharusnya keberadaan mereka hanya memberikan saran dan masukan kepada gubernur saja. "Ini sudah sampai kepada SKPD loh, akhirnya bisa menjadi kegalauan SKPD karena tidak berani menyerap anggaran," imbuhnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempersoalkan satu dari sembilan tugas TGUPP. Pada poin enam, kata dia, tugas yang diemban oleh TGUPP dianggap terlalu memberikan kewenangan berlebih untuk mengintervensi SKPD.

Gembong meminta agar keberadaan TGUPP dievaluasi. Bahkan usulan anggaran sekitar Rp 19,8 miliar untuk biaya operasional dan gaji mereka sebanyak 67 orang tersebut dinolkan saja. (fat)